

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Kimaam adalah salah satu entitas akuntansi dibawah Badan Pembinaan Akuntansi Instansi yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Kimaam mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawabandan dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Kimaam. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Kimaam, 31 Desember 2025
Kepala Kantor UPBU Kimaam

Agus Kurniawan, S.Si, T, M.M
Pembina IV (IV/a)
NIP. 19720221 199602 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	3
II. Neraca	4
III. Laporan Operasional	5
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	6
V. Catatan atas Laporan Keuangan	7
A. Penjelasan Umum	7
B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	18
C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	24
D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	37
E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	44
F. Pengungkapan Penting Lainnya	48
VI. Lampiran dan Daftar	x

KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA KIMAAM

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Laporan Keuangan Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kimaam yang terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggarandan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Kimaam, 31 Desember 2025
Kepala Kantor UPBU Kimaam

Agus Kurniawan, S.Si, T, M, M
Pembina IV (IV/a)
NIP. 19720221 199602 1 001

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Kimaam Semester II Tahun 2024 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode Januari sampe dengan 31 Desember 2025. Realisasi Pendapatan Negara pada Tanggal 31 Desember 2025 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp. 55.172.816,- atau mencapai 102,8 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp 53.627.000,-

Realisasi Belanja Negara pada 31 Desember adalah sebesar Rp 39.602.856,- atau mencapai 73.85 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp.17.337.577.000,-

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada Tanggal 31 Desember 2025. Nilai Aset per 31 Desember 2025 dicatat dan disajikan sebesar Rp. 35.410.078.297,- yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp. 35.410.078.297,- Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp. -; Aset Tetap (neto) sebesar Rp. 32.378.934.212,- dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp. 3.029.750.480,-

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp. 35.109.426.897,- dan Rp. 35.410.078.297,-

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional,

surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan Tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp. 55.172.816,- sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp. 17.337.577.000,- sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp. -9.357.601.360,- Surplus Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp -9.357.601.360,- dan sebesar Rp. -8.712.734.884,- sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp. -9.357.601.360,-

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp. 31.469.357.711,- dikurangi Defisit-LO sebesar Rp. -9.357.601.360,- ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp. Nihil dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp. 12.997.670.546,- sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2025 adalah senilai Rp. 35.109.426.897,-

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2025 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

**KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA KIMAAM
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PER 31 Desember 2025**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	PER 31 Desember 2025	
		ANGGARAN	REALISASI
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	53,627,000	55,172,816
JUMLAH PENDAPATAN		53,627,000	55,172,816
BELANJA	B.2.		
Belanja Pegawai	B.3	3,305,906,000	3,305,663,282
Belanja Barang	B.4	4,819,671,000	3,060,440,230
Belanja Modal	B.5	9,212,000,000	6,686,739,850
Belanja Bantuan Sosial	B.6	-	-
JUMLAH BELANJA		17,337,577,000	13,052,843,362

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

II. NERACA

KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA KIMAAM
NERACA
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024

URAIAN	CTTN	31 Des 2025	31 Des 2024
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	-	-
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	-	-
Piutang Bukan Pajak	C.4	-	-
Bagian Lancar TP/TGR	C.5	-	-
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.6	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lanjutan	C.7	-	-
Belanja Dibayar di Muka	C.8	-	-
Pendapatan yang Masih harus Diterima	C.9	-	-
Persediaan	C.10	1,393,605	4,507,155
Jumlah Aset Lancar		1,393,605	4,507,155
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Tagihan TP/TGR	C.11	-	-
Tagihan Penjualan Angsuran	C.12	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang	C.13	-	-
Jumlah Piutang Jangka Panjang		-	-
ASET TETAP			
Tanah	C.14	-	-
Peralatan dan Mesin	C.15	17,414,868,300	7,277,144,300
Gedung dan Bangunan	C.16	13,657,490,000	13,560,490,000
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.17	23,917,446,500	23,917,446,500
Aset Tetap Lainnya	C.18	4,290,005,000	4,290,005,000
Konstruksi dalam pengerjaan	C.19	1,970,140,770	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.20	(28,871,016,358)	(17,580,235,244)
Jumlah Aset Tetap		32,378,934,212	31,464,850,556
ASET LAINNYA			
Aset Tidak Berwujud	C.21	2,396,639,850	-
Dana Yang dibatasi Penggunaannya	C.22	633,110,630	-
Aset Lain-Lain	C.23	-	-
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.24	-	-
Jumlah Aset Lainnya		3,029,750,480	-
JUMLAH ASET		35,410,078,297	31,469,357,711
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Uang Muka dari KPPN	C.25	-	-
Utang kepada Pihak Ketiga	C.26	300,651,400	-
Utang Yang Belum Ditagihkan	C.27	-	-
Beban yang Masih Harus Dibayar	C.28	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		300,651,400	-
JUMLAH KEWAJIBAN		300,651,400	-
EKUITAS			
Ekuitas	C.29	35,109,426,897	31,469,357,711
JUMLAH EKUITAS		35,109,426,897	31,469,357,711
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		35,410,078,297	31,469,357,711

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

III. LAPORAN OPERASIONAL

KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA KIMAAM
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024

URAIAN	CATATAN	31 Des 2025	31 Des 2024
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	55,172,816	48,864,196
JUMLAH PENDAPATAN		55,172,816	48,864,196
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	3,305,663,282	2,301,426,287
Beban Persediaan	D.3	24,858,150	405,824,145
Beban Barang dan Jasa	D.4	1,132,468,181	1,252,458,880
Beban Pemeliharaan	D.5	1,833,486,000	1,303,624,000
Beban Perjalanan Dinas	D.6	72,741,449	346,391,970
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7	-	-
Beban Bantuan Sosial	D.8	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	3,043,557,114	3,151,873,798
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	-	-
JUMLAH BEBAN		9,412,774,176	8,761,599,080
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(9,357,601,360)	(8,712,734,884)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.11		
Surplus Penjualan Aset Nonlancar		-	-
Defisit Penjualan Aset Non Lancar		-	-
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	12,960,000
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	12,960,000
Defisit Selisih Kurs		-	-
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		-	12,960,000
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(9,357,601,360)	(8,699,774,884)
POS LUAR BIASA	D.12		
Pendapatan PNB		-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Persediaan		-	-
SURPLUS/DEFISIT LO		(9,357,601,360)	(8,699,774,884)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA KIMAAM
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PER 31 DESEMBER 2025
DAN 31 DESEMBER 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 Des 2025	31 Des 2024
EKUITAS AWAL	E.1	31,469,357,711	34,626,420,204
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(9,357,601,360)	(8,699,774,884)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3	-	-
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	E.3.1	-	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.3.2	-	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.3.3	-	-
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	E.3.4	-	-
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI	E.3.5	-	-
KOREKSI LAIN-LAIN	E.3.6	-	-
JUMLAH		-	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	12,997,670,546	5,542,712,391
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	E.5	3,640,069,186	(3,157,062,493)
EKUITAS AKHIR	E.6	35,109,426,897	31,469,357,711

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Kantor Unit

Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Kimaam

*Dasar Hukum
Entitas dan
Rencana
Strategis*

Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Kimaam didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan Penyelenggaraan Transportasi Yang Andal, Berdaya Saing dan Memberikan nilai tambah. Kementerian Negara/Lembaga Kantor Bandar Udara Kimaam bertujuan untuk Mewujudkan Penyelenggara Transportasi Udara Yang Efektif dan Efisien guna menunjang dan mendorong keberhasilan pembangunan

nasional.

Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Kimaam mempunyai tugas dan fungsi dalam memberikan bimbingan dan dukungan implementasi akuntansi pemerintah berbasis akrual pada Kementerian Negara/Lembaga. Melalui peran tersebut diharapkan kualitas laporan K/L dapat ditingkatkan yang pada akhirnya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dapat disajikan dengan akuntabel, akurat dan transparan.

Untuk mewujudkan tujuan di atas Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Kimaam berkomitmen dengan visi “**mewujudkan pelaksanaan penyelenggaraan keuangan negara yang efisien, akuntabel dan transparan melalui akuntansi pemerintah menuju Laporan Keuangan Kementerian/Negara yang berkualitas.**”

Untuk mewujudkannya akan dilakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

- Menyelenggarakan yang berkelanjutan berkaitan implementasi akuntansi pemerintah kepada Kementerian Negara/Lembaga.
- Membina secara efektif Kementerian Negara/Lembaga dalam pemanfaatan informasi keuangan yang dihasilkan oleh sistem akuntansi yang diimplementasikan.
- Mengembangkan sistem yang profesional dan terpercaya.

- Menyelenggarakan sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal kepada para pemangku kepentingan.

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2025 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor UPBU Kelas III Kimaam. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

*Basis
Akuntansi*

A.3. Basis Akuntansi

Kantor UPBU Kelas III Kimaam menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau

dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Dasar
Pengukuran*

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Kimaam dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan
Akuntansi*

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2025 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Kimaam.

Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Kimaam adalah sebagai berikut:

*Pendapatan-
LRA*

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi
- berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada

tanggal neraca

- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat
 - b) Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - c) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
 - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan

operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.

- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum

tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Piutang Jangka Panjang

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka

Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas

- Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:
- *Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud*

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada

Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B.PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Uraian	2025	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
Pendapatan		
Pendapatan Jasa	53,627,000	53,627,000
Pendapatan Lain-lain	0	-
Jumlah Pendapatan	53,627,000	53,627,000
Belanja		
Belanja Pegawai	2,328,192,000	3,305,906,000
Belanja Barang	4,059,098,000	4,819,671,000
Belanja Modal	5,600,000,000	9,212,000,000
Belanja Bantuan Sosial	0	-
Jumlah Belanja	11,987,290,000	17,337,577,000

Realisasi
Pendapatan Rp.
55.172.816,-

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp. 55.172.816,- atau mengalami kenaikan 102,8 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp. 53.627.000,- Pendapatan Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Kimaam terdiri dari Pendapatan Jasa dan Pendapatan Lain-lain dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2025		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Pendapatan Jasa	53,627,000	50,527,540	94.22
Sewa Gedung dan Bangunan		4,645,276	
Pendapatan Lain-lainnya	-	-	-
Jumlah	53,627,000	55,172,816	102.88

Realisasi Pendapatan Jasa Per- 31 Desember 2025 mengalami kenaikan 102.8 persen dibandingkan per-31 Desember 2024.

Perbandingan Realisasi Pendapatan Per 31 Desember
2025 dan 2024

Uraian	Realisasi 31 Des 2025	Realisasi 31 Des 2024	Naik (Turun) %
Pendapatan Jasa	50,527,540	44,058,700	14.68
Pendapatan Sewa Tanah,Gedung dan Bangunan	4,645,276	4,805,496	-3.33
Pendapatan lainnya	-	12,960,000	
Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	-	-	
Pendapatan dari Penandatanganan	-		
BMN Lainnya			
Jumlah	55,172,816	61,824,196	-10.76

Realisasi Belanja
Negara Rp.
13.052.843.362,-

B.2 Belanja

Realisasi Belanja instansi pada Per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp. 13.052.843.362,- atau 75.29% dari anggaran belanja sebesar Rp. 17.337.577.000,-. Rincian anggaran dan realisasi belanja Per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Per- 31
Desember 2025

Uraian	Per-31 Desember 2025		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	3,305,906,000	3,305,663,282	99.99
Belanja Barang	4,819,671,000	3,060,440,230	63.50
Belanja Modal	9,212,000,000	6,686,739,850	72.59
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Total Belanja Kotor	17,337,577,000	13,052,843,362	75.29
Pengembalian		-	-
Jumlah	17,337,577,000	13,052,843,362	75.29

Dibandingkan dengan Periode 31 Desember 2025, Realisasi Belanja Per- 31 Desember 2024 mengalami Penurunan sebesar 75.29% dibandingkan realisasi belanja periode sebelumnya.

Perbandingan Realisasi Belanja
Per 31 Desember 2025 dan 2024

URAIAN	PER-31 Des 2025	PER-31 Des 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	3,305,663,282	2,303,217,000	43.52
Belanja Barang	3,060,440,230	3,506,775,000	(12.73)
Belanja Modal	6,686,739,850	-	#DIV/0!
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Jumlah	13,052,843,362	5,809,992,000	124.66

Belanja Pegawai
Rp.3.305.906.000,-

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 3.305.906.000,- dan Rp.2.301.426.287,- Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi

belanja Per 31 Desember 2025 mengalami Kenaikan sebesar 99.99 persen dari Per- 31 Desember 2024.

Perbandingan Belanja Pegawai Per 31 Desember 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI Per 31 Des 2025	REALISASI Per 31 Des 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	2,473,790,282	2,231,304,735	10.87
Belanja Lembur PNS	50,117,000	71,562,000	(29.97)
Belanja Lembur PPPK	4,953,000		
Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK	776,803,090	-	-
Jumlah Belanja Kotor	3,305,663,372	2,302,866,735	43.55
Pengembalian Belanja Pegawai	90	1,440,448	-
Jumlah Belanja	3,305,663,282	2,301,426,287	43.64

B.4 Belanja Barang

Belanja Barang
Rp.3.060.440.230,-

Realisasi Belanja Barang Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 3.060.440.230,- dan Rp. 3.303.110.300,- Realisasi Belanja Barang 31 Desember 2025 mengalami Kenaikan 77.31 % dari Realisasi Belanja Barang per-31 Desember 2024.

*Perbandingan Belanja Barang
Per 31 Desember 2025 dan 2024*

URAIAN	REALISASI PER- 31 Des 2025	REALISASI PER- 31 Des 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	660,082,000	742,670,000	(11.12)
Belanja Barang Non Operasional	0	30,183,880	(100.00)
Belanja Jasa	472,386,181	479,605,000	-
Belanja Barang Persediaan	23,409,600	133,863,000	
Belanja Pemeliharaan	1,831,821,000	1,570,396,450	16.65
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	72,741,449	346,391,970	(79.00)
Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masy.	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	3,060,440,230	3,303,110,300	(7.35)
Pengembalian Belanja		-	
Jumlah Belanja	3,060,440,230	3,303,110,300	(7.35)

Belanja Modal

Rp.6.686.739.850,-

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 6.686.739.850,- dan Rp. NIHIL,- Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.Realisasi Belanja Modal pada 31 Desember 2025 mengalami Kenaikan 72.59 persen dibandingkan 31 Desember 2024.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal

Per 31 Desember 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI PER-31 Des 2025	REALISASI PER-31 Des 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Tanah	0	0	0.00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1,890,500,000	0	#DIV/0!
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2,399,600,000	0	#DIV/0!
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0.00
Belanja Modal Lainnya	2,396,639,850	0	0.00
Jumlah Belanja Kotor	6,686,739,850	0	#DIV/0!
Pengembalian	0	0	-
Jumlah Belanja	6,686,739,850	0	#DIV/0!

Belanja Modal

Tanah Rp.NIHIL

B.5.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. NIHIL dan Rp. NIHIL

Perbandingan Realisasi Belanja Modal

Per 31 Desember 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI PER 31 Des 2025	REALISASI PER 31 Des 2024	Naik (Turun) %
Belanja Modal Tanah	0	0	0.00
Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Tanah	0	0	0.00
Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah	0	0	0.00
Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah	0	0	0.00
Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah	0	0	0.00
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0.00
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja	0	0	#DIV/0!

Belanja Modal
Peralatan dan
Mesin

Rp.1.890.500.000,-

B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp. 1.890.500.000,- dan TA 2024 sebesar Rp. NIHIL,-

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI PER 31 Des 2025	REALISASI PER 31 Des 2024
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1,890,500,000	0
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1,890,500,000	0
Pengembalian	-	-
Jumlah Belanja	1,890,500,000	0

Belanja Modal
Gedung dan
Bangunan

Rp.2.399.600.000,-

B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 2.399.600.000,- dan Rp. NIHIL,-Realisasi Belanja Modal Per 31 Desember 2025 mengalami Kenaikan sebesar 49.99% dibandingkan Realisasi TA 2024,dikarenakan pagu pada pekerjaan belanja modal gedung dan bangunan di tahun 2024 tidak ada.

Perbandingan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan Per 31 Desember 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BELANJA	Per 31 Des 2025	Per 31 Des 2024	NAIK (TURUN) %	
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2,399,600,000	0		
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	0	0		
	0	0	0.00	
Jumlah Belanja Kotor	2,399,600,000	0	0.00	
Pengembalian Belanja Modal	-		0.00	
Jumlah Belanja	2,399,600,000	0	0.00	

Belanja Modal
Jalan,Irigasi dan
Jaringan
Rp.NIHIL

B.5.4 Belanja Modal Jalan,Irigasi dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Nihil dan Rp. Nihil

Perbandingan Realisasi Belanja Modal
Per 31 Desember 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BELANJA	PER- 31 Des 2025	PER- 31 Des 2024	Naik (Turun) %
Belanja Modal Jalan,Irigasi dan Jaringan	0	0	
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Jaringan	0	0	0.00
Jumlah Belanja Kotor	0	0	#DIV/0!
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja	0	0	#DIV/0!

Belanja Modal
lainnya
Rp.2.396.639.850,-

B.5.5 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 2.396.639.850,- dan Rp. NIHIL.

URAIAN JENIS BELANJA	PER- 31 Des 2025	PER- 31 Des 2024	Naik (Turun) %
Belanja Modal Lainnya	2,396,639,850	0	0.00
	0	0	0.00
Jumlah Belanja Kotor	2,396,639,850	0	0.00
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja	2,396,639,850	0	0.00

Belanja Bantuan
Sosial Rp.NIHIL

B.6 Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. NIHIL dan Rp. NIHIL Belanja bantuan sosial merupakan belanja pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat

selektif. dalam bentuk barang. Bantuan ini diberikan kepada kelompok-kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial yaitu rendahnya tingkat pendidikan yang disebabkan banyaknya daerah miskin

.

Perbandingan Realisasi Belanja Bantuan Sosial
Per 31 Desember 2025 dan 2024

URAIAN	PER- 31 Des 2025	PER- 31 Des 2024	NAIK (TURUN) %
-	0	0	0.00
	0	0	0.00
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0.00
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	0	0	0.00

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di
Bendahara
Pengeluaran
Rp.NIHIL

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Des 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. NIHIL,- dan Rp. NIHIL,- yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggung-jawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca.Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran Per 31 Desember 2025
dan Desember 2024

Keterangan	Per- 31 Des 2025	Per-31 Des 2024
Uang Tunai	NIHIL	NIHIL
Bank	-	-
Jumlah	NIHIL	NIHIL

Kas di
Bendahara
Penerimaan
Rp. NIHIL

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar masing-masing Rp. NIHIL dan Rp. NIHIL Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Rincian Kas di Bendahara Penerimaan

Per 31 Desember 2025 dan 2024

Keterangan	Per-31 Des 2025	Per-31 Des 2024
Uang Tunai	-	-
Bank	-	-
Jumlah	-	-

Kas Lainnya
dan Setara Kas
Rp. NIHIL

C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp. NIHIL dan Rp.NIHIL

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, kas lainnya dan setara kas. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas
Per 31 Desmber 2025 dan Desember 2024

Keterangan	Per-31 Des 2025	Per-31 Des 2024
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	-	-
Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	-	-
Kas Lainnya di KL dari Hibah yang Belum Disahkan	-	-
Jumlah	-	-

Piutang PNBP
Rp. NIHIL

C.4 Piutang PNBP

Saldo Piutang PNBP per 31 Desember 2025 dan Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp. NIHIL dan Rp. NIHIL Piutang PNBP merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Piutang PNBP disajikan disajikan sebagai berikut:

Rincian Piutang PNBP Per 31 Desember 2025 dan Desember 2024

Uraian	Per-31 Des 2025	Per-31 Des 2024
Piutang PNBP	-	-
Piutang Lainnya	-	-
Jumlah	-	-

Bagian Lancar
Tagihan TP/TGR
Rp.NIHIL

C.5 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/
Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.NIHIL dan Rp.NIHIL Bagian Lancar TP/TGR merupakan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal pelaporan yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian Bagian Lancar TP/TGR adalah sebagai berikut:

Rincian Bagian Lancar TP/TGR
Per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Nama	Per-31 Des 2025	Per-31 Des 2024
1	-	-	-
2	-	-	-
3	-	-	-
4	-	-	-
Jumlah		-	-

Bagian Lancar
TPA
Rp.NIHIL

C.6 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp. NIHIL dan Rp. NIHIL Bagian Lancar TPA merupakan Tagihan TPA yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan, dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Bagian Lancar TPA Per 31 Desember 2025 dan 31
Desember 2024

No	Nama	Per-31 Des 2025	31 Des 2024
1	-		-
2	-	-	-
3	-	-	-
Jumlah		-	-

Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih –
Piutang Lancar
Rp.NIHIL

C.7 Penyisihan Piutang Tak Tertagih –Piutang Lancar

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. NIHIL dan Rp.NIHIL.

Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang lancar yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Belanja Dibayar
di Muka
Rp.NIHIL

C.8 Belanja Dibayar di Muka

Saldo Belanja Dibayar di Muka per Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp.NIHIL dan Rp. NIHIL Belanja dibayar dimuka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Rincian Belanja Dibayar di Muka adalah sebagai berikut:

Rincian Belanja Dibayar di Muka
Per 31 Desember 2025 dan 2024

Jenis	Per-31 Des 2025	per-31 Des 2024
Pembayaran Internet	-	-
Pembayaran Sewa Peralatan dan Mesin	-	-
Pembayaran Sewa Gedung Kantor	-	-
Jumlah	-	-

Pendapatan
yang Masih
Harus Diterima
Rp.NIHIL

C.9 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang Masih Harus Diterima per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp.NIHIL dan Rp.NIHIL merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diserahkan tagihannya kepada penerima jasa. Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima berdasarkan jenis pendapatan sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Pendapatan yang Masih Harus
Dibayar per-31 Desember 2025 dan Desember 2024

Jenis	Per-31 Des 2025	Per-31 Des 2024
Pendapatan Jasa Pelatihan	-	-
Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan	-	-
Jumlah	-	-

Persediaan
Rp.1.393.605,-

C.10 Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp.1.393.605,- dan Rp.4.507.155,- Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.Rincian Persediaan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan Per 31 Desember 2025
dan Desember 2024

Jenis	Per-31 Des 2025	Per-31 Des 2024
Barang Konsumsi	1,393,605	4,507,155
Barang untuk Pemeliharaan	-	-
Suku Cadang	-	-
Barang Persediaan untuk Diserahkan kepada Masyarakat	-	-
Persediaan Lainnya	-	-
Jumlah	1,393,605	4,507,155

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

Tagihan
TP/TGR
Rp.NIHIL

C.11 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp. NIHIL dan Rp. NIHIL.

Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara

Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada

pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya
Rincian Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan

Ganti Rugi (TP/TGR) per tanggal 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Tagihan TP/TGR
Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember2024

No	Debitur	Per-31 Des 2025	Per-31 Des 2024
1	-	-	-
2	-	-	-
3	-	-	-
4	-	-	-
5	-	-	-
6		-	-
Jumlah		-	-

Tagihan
Penjualan
Angsuran
Rp. NIHIL

C.12 Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. NIHIL dan Rp. NIHIL Tagihan Penjualan Angsuran adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara atas transaksi jual/beli aset tetap instansi. Rincian Tagihan PA untuk masing-masing debitur adalah sebagai berikut:

Rincian Tagihan TPA Per 31 Desember 2025
dan Desember 2024

No	Debitur	Per-31 Des 2025	Per-31 Des 2024
1	-	-	-
2	-	-	-
3	-	-	-
4	-	-	-
5	-	-	-
Jumlah		-	-

Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih –
Piutang Jangka
Panjang
Rp.NIHIL

C.13 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.NIHIL dan Rp. NIHIL Penyisihan Piutang Tak Tertagih– Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan PA dan TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih– Piutang Jangka Panjang untuk masing-masing kualitas piutang adalah sebagai berikut:

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang TA 2025

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Panjang	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Tagihan TP/TGR			
Lancar	-	0,50%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	-		-
Tagihan PA			
Lancar	-	0,50%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	-		-
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	-		-

Tanah
Rp.NIHIL

C.14 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Kimaam per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. NIHIL dan Rp. NIHIL

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	0
Mutasi tambah:	
Pembelian	0
Mutasi kurang:	
Revaluasi aset	-
Penyitaan pengadilan	0
Saldo Per 31 Desember 2025	0
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2025	-
Nilai Buku per 31 Desember 2025	0

Rincian saldo Tanah per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Tanah TA 2025

No	Luas	Lokasi	Nilai
			-

Peralatan dan
Mesin
Rp.17.414.868.
300,-

C.15 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah Rp. 17.414.868.300,- dan Rp.7.277.144.300,- Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut

dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2025	17,414,868,300
Mutasi tambah:	0
Pembelian	0
Hibah Barang	0
Transfer Masuk	0
Koreksi tambah	0
Mutasi kurang:	0
Penghentian dari penggunaan	-
Saldo per 31 Desember 2025	17,414,868,300
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	(14,813,463,285)
Nilai Buku per 31 Desember 2025	2,601,405,015

C.16 Gedung dan Bangunan

Gedung dan
Bangunan
Rp.13.657.490.
000

Nilai Gedung dan Bangunan Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah Rp. 13.560.490.000 dan Rp. 13.560.490.000,- Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	13,657,490,000
Mutasi tambah:	-
Pembangunan tambahan ruang kelas	-
Mutasi kurang:	-
Saldo per 31 Desember 2025	13,657,490,000
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	(2,177,432,932)
Nilai Buku per 31 Desember 2025	11,480,057,068

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Jalan,Jaringan
dan Irigasi Rp.
23.917.446.500

C.17 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.23.917.446.500,- dan Rp. 23.917.446.500,- Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	23,917,446,500
Mutasi tambah:	-
Penambahan jaringan teknologi informasi	-
Mutasi kurang:	-
Saldo per 31 Desember 2025	23,917,446,500
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	(11,880,120,141)
Nilai Buku per 31 Desember 2025	12,037,326,359

Aset Tetap
Lainnya Rp.
4.290.005.000,-

C.18 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah Rp. 4.290.005.000 dan Rp. 4.290.005.000, sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 20254	4,290,005,000
Mutasi tambah:	
-	0
Mutasi kurang:	
Saldo per 31 Desember 2025	4,290,005,000
Akumulasi Penyusutan Per 31 Desember 2025	0
Nilai Buku per 31 Desember 2025	4,290,005,000

Rincian Aset Tetap Lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Konstruksi
Dalam
Pengerjaan
Rp.1.970.140.7
70,-

C.19 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 1.970.140.770,- dan NIHIL dengan ini dijelaskan KDP yang ada pada CALK Kantor UPBU Kimaam per-31 Desember 2025 dengan total NIHIL

Akumulasi
Penyusutan
Aset Tetap Rp.-
28.871.016.358
,-

C.20 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 September 2024 dan 30 September 2023 adalah masing-masing Rp. - 28.871.016.358,- dan Rp. -17.580.235.244,- Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 September 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
Per 31 Desember 2025

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	17,414,868,300	(14,813,463,285)	2,601,405,015
2	Gedung dan Bangunan	13,657,490,000	(2,177,432,932)	11,480,057,068
3	Jalan dan Jembatan	23,552,446,500	(11,848,182,641)	11,704,263,859
4	Jaringan	365,000,000	(31,937,500)	333,062,500
4	Aset Tetap Renovasi	4,290,005,000	0	4,290,005,000
Akumulasi Penyusutan		17,414,868,300	(28,871,016,358)	30,408,793,442

13657490000

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

C.21 Aset Tak Berwujud

Aset Tak
Berwujud
Rp. NIHIL

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah Rp.NIHIL dan Rp. NIHIL

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik.

Saldo Nilai Perolehan Per 31 Desember 2024	-
Mutasi tambah:	
Pembelian	-
Mutasi kurang:	-
Saldo per 31 Desember 2025	-
Akumulasi Amortisasi s.d.31 Desember 2025	-
Nilai Buku per 31 Desember 2025	-

Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Aset Tak berwujud Per 31 Desember 2025

Uraian	Per- 31 Desember 2025
-	0
-	-
Jumlah	0

Aset Lain-Lain
Rp. NIHIL

C.22 Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah Rp. NIHIL dan Rp.NIHIL Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2024	-
Mutasi tambah:	
- reklasifikasi dari aset tetap	-
Mutasi kurang:	
- penggunaan kembali BMN yang dihentikan	-
- penghapusan BMN	-
Saldo per 31 Desember 2025	-
Akumulasi Penyusutan s/d per 31 Desember 2025	-
Nilai Buku per 31 Desember 2025	-

Akumulasi
Penyusutan dan
Amortisasi Aset
Lainnya
Rp.NIHIL

C.23 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing Rp. NIHIL dan Rp. NIHIL Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutandan Amortisasi Aset Lainnya

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Aset Tak Berwujud			
-	0	0	0
Jumlah	0	0	0
Aset Lain-lain	0	0	0
Jumlah	0	0	0

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

Uang Muka dari
KPPN Rp. NIHIL

C.24 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp.NIHIL dan Rp.NIHIL

Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Utang kepada Pihak Ketiga
Rp. NIHIL

C.25 Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp.NIHIL dan Rp.NIHIL Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihakketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan.Adapun rincian Utang Pihak Ketiga pada Kantor Akuntansi Istimewa Jayapura per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

RincianUtang kepada Pihak Ketiga

Uraian	Jumlah	Penjelasan
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Total	-	

Pendapatan Diterima di Muka
Rp.NIHIL

C.26 Pendapatan Diterima di Muka

Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. NIHIL dan Rp.NIHIL Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah diterima pembayarannya, namun barang/jasa belum diserahkan. Keseluruhan Pendapatan Diterima di Muka tersebut bersumber dari jasa konsultasi akuntansi yang jangka waktu kontraknya lebih dari satu tahun, dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga

Uraian	Jumlah
Total	-

Beban yang Masih Harus Dibayar
Rp.NIHIL

C.27 Beban yang Masih Harus Dibayar

Beban yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 sebesar Rp.NIHIL dan Rp.NIHIL merupakan

kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang pada tanggal pelaporan keuangan belum diterima tagihannya, dengan rincian sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Beban yang Masih Harus Dibayar Per 31 Desember 2025

Uraian	31-Dec-25	2024
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Jumlah	-	-

Ekuitas

Rp.31.469.357.

711,-

C.28 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.31.469.357.711,- dan Rp. 34.626.420.204,- Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas

Pendapatan PNB

Rp.55.172.816,-

D.PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. 55.172.816,- dan Rp 61.824.196,- Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Per 31 Desember 2025 dan 2024

URAIAN	Per 31 Des 2025	Per 31 Des 2024	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Jasa	50,527,540	44,058,700	15
Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	4,645,276	4,805,496	(3)
Pendapatan Lain-lain	0	12,960,000	0
Jumlah	55,172,816	61,824,196	(11)

Pendapatan Jasa berasal dari PJP2U ,PJP4U dan Sewa Gedung dan Bangunan.

Beban Pegawai
Rp. 3.305.663.282,-

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 3.305.663.282,- dan Rp. 2.301.426.287,- Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

*Rincian Beban Pegawai 31 Desember 2025
dan 2024*

URAIAN	Per 31 Des 2025	Per 31 Des 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji	3,305,663,282	2,301,426,995	44
Beban Tunjangan-tunjangan	0	0	#DIV/0!
Beban Honorarium dan Vakasi	-	-	#DIV/0!
Beban Lembur	-	-	#DIV/0!
Jumlah	3,305,663,282	2,301,426,995	44

Beban Persediaan

Rp.24.858.150,-

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 24.858.150,- dan Rp. 405.824.145,- Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk Per-31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan
Per 31 Desember 2025 dan 2024

URAIAN	Per 31 Des 2025	Per 31 Des 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	24,858,150	405,824,145	(94)
Beban Persediaan Bahan Baku		0	#DIV/0!
Beban Persediaan Lainnya		-	#DIV/0!
	-	-	#DIV/0!
Jumlah	24,858,150	405,824,145	(94)

Beban Barang dan
Jasa
Rp.1.132.468.181.,
-

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2025 adalah masing-masing sebesar Rp. 1.132.468.181,- dan Rp. 1.252.458.880,- Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

Rincian Beban Barang dan Jasa
per 31 Desember 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	Per 31 Des 2025	Per 31 Des 2024	Naik (Turun)%
Beban Keperluan Perkantoran	304,250,000	543,200,000	(43.99)
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	0	4,250,000	0.00
Beban Jasa Pos dan Giro	-	0	#VALUE!
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	55,832,000	85,320,000	0.00
Beban Barang Operasional Lainnya	300,000,000	109,900,000	172.98
Beban Bahan	0	30,183,880	0.00
Beban Barang Non Operasional Lainnya	0	0	-
Beban Barang Non Operasional-Pandemi Covid-19	0	0	
Beban Langganan Telepon	7,321,505	9,000,000	
Beban Langganan Listrik	10,549,000	15,000,000	(29.67)
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	386,280,000	406,705,000	(5.02)
Beban Sewa	68,235,676		
Beban Jasa Konsultasi	0	49,500,000	
Beban Aset Ekstrakomtabel Aset Tetap Lainnya	0	0	0.00
Jumlah	1,132,468,181	1,253,058,880	(9.62)

Beban
Pemeliharaan
Rp.1.833.486.000,
-

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 1.833.486.000,- dan Rp. 1.303.624.000,- Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Penurunan beban pemeliharaan disebabkan kecilnya beban Pemeliharaan Lainnya. Rincian untuk Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan
Per 31 desember 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	PER 31 Des 2025	PER 31 des 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	252,606,000	232,460,000	8.67
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	87,040,000	134,343,000	(35.21)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	291,949,000	193,539,000	
Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	776,496,000	698,102,000	11.23
Beban Pemeliharaan Irigasi	45,000,000	30,030,000	
Beban Pemeliharaan Jaringan	0	6,825,000	(100.00)
Beban Persediaan pita cukai,materai dan leges	0		
Beban Bahan Bakar Minyak dan Pelumas (BMP)	378,730,000		
Beban Persediaan bahan baku	0	0	
Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan	1,665,000	8,325,000	(80.00)
Beban Persediaan Suku Cadang	0	0	#DIV/0!
Jumlah	1,833,486,000	1,303,624,000	40.65

Beban Perjalanan
Dinas
Rp.72.741.449,-

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 72.741.449,- dan Rp. 346.391.970,- Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas
Per 31 Desember 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	Per 31 Des 2025	Per 31 Des 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	0	46,862,000	-100.00
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	0	0	0.00
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0	0	0.00
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	72,741,449	299,529,970	0.00
Jumlah	72,741,449	346,391,970	-79.00

Beban Barang
untuk Diserahkan
kepada
Masyarakat
Rp.NIHIL

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. NIHIL dan Rp. NIHIL,- Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas.

Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

URAIAN JENIS BEBAN	Per 31 Des 2025	Per 31 Des 2024	NAIK (TURUN) %	
Beban Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0.00	
Beban Barang Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0.00	
Jumlah	0	0	0.00	

Beban Bantuan Sosial Rp.NIHIL

D.8 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.NIHIL dan Rp.NIHIL Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Rincian Beban Bantuan Sosial untuk Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Bantuan Sosial
Per 31 Desember 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	Per 31 Des 2025	Per 31 Des 2024	% NAIK (TURUN)
Beban Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial	0	0	0.00
Beban Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial	0	0	0.00
Beban Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial	0	0	0.00
Jumlah	0	0	0.00

Beban Penyusutan dan Amortisasi
Rp.3.043.557.114,
-

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 3.043.557.114,- dan Rp. 3.151.873.798,- Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
Per 31 Desember 2025 dan 2024

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	Per 31 Des 2025	Per 31 Des 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	357,714,151	433,179,151	(17.42)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	290,445,275	289,166,959	0.44
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	2,386,272,688	2,420,400,688	(1.41)
Beban Penyusutan Jaringan	9,125,000	9,125,000	
Beban Penyusutan Irigasi	-	-	#DIV/0!
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	-	-	-
Jumlah Penyusutan	3,043,557,114	3,151,871,798	(3.44)
Beban Amortisasi Software	-	-	-
Beban Penyusutan aset lain-lain	-	-	-
Jumlah Amortisasi	-	-	-
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	3,043,557,114	3,151,871,798	-

Beban Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih Rp.NIHIL

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Per 31 desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.NIHIL dan Rp.NIHIL Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Per 31 Desember 2025 dan 31 desember 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih
Per 31 Desember 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	Per 31 Des 2025	Per 31 Des 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar	0	0	#DIV/0!
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Non Lancar	0	0	#DIV/0!
Jumlah	0	0	#DIV/0!

Surplus dari
Kegiatan Non
Operasional
Rp.NIHIL

D.11 Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus dari Kegiatan Non Operasional Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional TA
Per 31 Desember 2025 dan 2024

URAIAN	Per 31 Des 2025	Per '31 Des 2024	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan *)	0	0	#DIV/0!
	0	0	#DIV/0!
	-	0	#VALUE!
	0		-
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	0	0	#DIV/0!

*)Pendapatan/BebanPenyesuaian Nilai Persediaan timbul karena kebijakan penilaian persediaan menggunakan metode Harga Perolehan Terakhir. Akun ini tidak akan muncul ketika penilaian persediaan menggunakan metode First In First Out (FIFO)

Pos Luar Biasa
Rp.NIHIL

D.12 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa untuk Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

URAIAN	Per 31 Des 2025	Per 31 Des 2024	NAIK (TURUN) %
Pendapatan PNPB	0	0	#DIV/0!
Beban Perjalanan Dinas	0	0	#DIV/0!
Beban Persediaan	0	0	#DIV/0!
Jumlah	0	0	#DIV/0!

PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal

E.1 Ekuitas Awal

Rp.31.469.357.711,-

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.31.469.357.711,- dan Rp. 34.626.420.204,-

Defisit LO
Rp.-
9.357.601.136,-

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. -9.357.601.136,- dan Rp. -8.699.774.884,- Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa

Penyesuaian Nilai Aset
Rp.NIHIL

E.3.1 Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp.NIHIL dan Rp. NIHIL Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir

Koreksi Nilai
Persediaan
Rp.NIHIL

E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pencatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.NIHIL dan Rp.NIHIL Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk Per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Nilai Persediaan

Jenis Persediaan	Koreksi
Barang Konsumsi	-
Suku Cadang	-
Jumlah	-

Selisih Revaluasi
Aset Tetap Rp.-
NIHIL

E.3.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. NIHIL dan Rp. NIHIL

KoreksiAset Tetap
Non Revaluasi Rp.
NIHIL

E.3.4 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. NIHIL dan Rp. NIHIL Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi
Per 31 Desember 2025

Jenis Aset Tetap	Nilai Koreksi
Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	-
Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi	-
Jumlah	-

Koreksi Lain-Lain
Rp.NIHIL

E.3.5 Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp.NIHIL dan Rp.NIHIL Koreksi ini merupakan koreksi

selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Koreksi lain-lain terdiri dari:

Rincian Koreksi Lain-Lain

Jenis Beban	Jumlah Koreksi
Koreksi Lainnya	-
Ekuitas Transaksi Lainnya	-
	-
	-
	-
Jumlah	-

Transaksi Antar
Entitas Rp
12.997.670.546,-

E.4 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 12.997.670.546,- dan Rp. 5.542.712.391,- Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Ditagihkan Ke Entitas Lain	13,052,843,362
Diterima dari Entitas Lain	55,172,816
Transfer Masuk	-
Transfer Keluar	-
Pengesahan Hibah Langsung	-
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-
Jumlah	12,997,670,546

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

E.4.1Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2025, DDEL sebesar Rp.- 55.172.816,- sedangkan DKEL sebesar Rp.NIHIL,-

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas

lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN. Transfer Masuk sampai dengan tanggal Per- 31 Desember 2025 sebesar Rp .NIHIL terdiri dari:

No	Jenis	Entitas Asal	Nilai
1	Peralatan dan Mesin	Kantor UPBU Kimaam	-
3	Persediaan	Deputi Akuntansi	-
	Jumlah		-

E.4.3Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatanhibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan Per 31 Desember 2025 sebesar Rp. NIHIL dari total Rp. NIHIL yang diterima sepanjang tahun 2024 Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan Per 31 desember 2025 Rp. NIHIL Rincian pengesahan Hibah untuk Per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

No	Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Nilai Hibah
1	WHO	Uang	Rp -
2	PT Semua Bahagia	Barang	Rp -
Total Pengesahan			Rp -
Pengesahan Pengembalian Hibah			Rp -
Jumlah			Rp -

Ekuitas Akhir
Rp.35.109.426.897,-

E.5 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 35.109.426.897,- dan Rp. 31.469.357.711,-

F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

F.1 Kejadian-kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca

F.2 Pengungkapan Lain-lain

1. Adanya To Dolist pada Monsakti yaitu utang yang belum diterima tagihannya dikarenakan terdapat Pembayaran Belanja Modal Pembuatan RTT Sisi Darat dan Udara yang dibayarkan tanggal 1 Oktober 2025 dan SP2D tertanggal 3 Oktober 2025 tetapi BAPP di tanggal 29 September 2025. Sehingga terbaca di Monsakti menjadi Utang yang belum diterima tagihannya.
2. Karena terdapat pekerjaan pembuatan bangunan operasional mess pegawai tipe 2 (2 Unit) yang belum bisa diselesaikan dengan progres per tanggal 31 desember 2025 adalah 83.98% dan masih diberikan kesempatan penyelesaian pekerjaan melewati batas akhir anggaran.

LAPORAN OPERASIONAL

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2025

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

ESELON I : (05) DITJEN PERHUBUNGAN UDARA

WILAYAH/PROVINSI : (2500) PAPUA

SATUAN KERJA : (499578) KANTOR UPBU KIMAM

Tgl Data : 13/02/26 7:44 AM

Tgl Cetak : 13/02/26 1:08 PM

Halaman : 1

lap_lo_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan dari Kekayaan Negara dipisahkan (KND)	0	0	0	
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	55,172,816	48,864,196	6,308,620	12.911
Pendapatan Badan Layanan Umum	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	55,172,816	48,864,196	6,308,620	12.911
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	55,172,816	48,864,196	6,308,620	12.911
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	3,305,663,282	2,301,426,287	1,004,236,995	43.635
Beban Persediaan	24,858,150	405,824,145	(380,965,995)	(93.875)
Beban Barang dan Jasa	1,132,468,181	1,252,458,880	(119,990,699)	(9.58)
Beban Pemeliharaan	1,833,486,000	1,303,624,000	529,862,000	40.645
Beban Perjalanan Dinas	72,741,449	346,391,970	(273,650,521)	(79)
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2025

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
ESELON I : (05) DITJEN PERHUBUNGAN UDARA
WILAYAH/PROVINSI : (2500) PAPUA
SATUAN KERJA : (499578) KANTOR UPBU KIMAM

Tgl Data : 13/02/26 7:44 AM

Tgl Cetak : 13/02/26 1:08 PM

Halaman : 2

lap_lo_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	3,043,557,114	3,151,873,798	(108,316,684)	(3.437)
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Transfer ke Daerah	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	9,412,774,176	8,761,599,080	651,175,096	7.432
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(9,357,601,360)	(8,712,734,884)	(644,866,476)	7.401
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset	0	0	0	
Pendapatan Pelepasan Aset	0	0	0	
Beban Pelepasan Aset	0	0	0	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	12,960,000	(12,960,000)	(100)
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	12,960,000	(12,960,000)	(100)
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	12,960,000	(12,960,000)	(100)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(9,357,601,360)	(8,699,774,884)	(657,826,476)	7.561
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(9,357,601,360)	(8,699,774,884)	(657,826,476)	7.561

Keterangan :
FINAL

KIMAAM, 13 Februari 2026
Penanggung Jawab UAKPA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

AGUS KURNIAWAN, S.SiT, M.M.
NIP. 197202211996021001

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2025

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

UNIT ORGANISASI : (05) DITJEN PERHUBUNGAN UDARA

WILAYAH/PROVINSI : (2500) PAPUA

SATUAN KERJA : (499578) KANTOR UPBU KIMAM

Tgl Data : 13/02/26 6:38 AM

Tgl Cetak : 13/02/26 1:08 PM

Halaman : 1

lap_lpe_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	31,469,357,711	34,626,420,204	(3,157,062,493)	(9.12)
SURPLUS/DEFISIT-LO	(9,357,601,360)	(8,699,774,884)	(657,826,476)	7.56
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	0	0	0	0
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	0
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	0
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	0	0	0	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	12,997,670,546	5,542,712,391	7,454,958,155	134.5
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	3,640,069,186	(3,157,062,493)	6,797,131,679	(215.3)
EKUITAS AKHIR	35,109,426,897	31,469,357,711	3,640,069,186	11.57

Keterangan :

FINAL

KIMAAM, 13 Februari 2026

Penanggung Jawab UAKPA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

AGUS KURNIAWAN, S.SIT, M.M.

NIP. 197202211996021001

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 022
ESELON I : DITJEN PERHUBUNGAN UDARA 05
SATUAN KERJA : KANTOR UPBU KIMAM 499578

Tgl Data : 13/02/26 7:44 AM
Tgl Cetak : 13/02/26 1:09 PM
Halaman : 1
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2025				2024			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
A. Pendapatan Negara Dan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Pendapatan Perpajakan	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Pajak Dalam Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pajak Perdagangan Internasional	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	53,627,000	55,172,816	1,545,816	102.88	60,641,000	61,824,196	1,183,196	101.95
1. Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pendapatan BLU	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	53,627,000	55,172,816	1,545,816	102.88	60,641,000	61,824,196	1,183,196	101.95
III. Pendapatan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)	53,627,000	55,172,816	1,545,816	102.88	60,641,000	61,824,196	1,183,196	101.95
B. Belanja Negara	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belanja Pemerintah Pusat	17,337,577,000	13,052,843,362	(4,284,733,638)	75.29	5,809,992,000	5,604,536,587	(205,455,413)	96.46
1. Belanja Pegawai	3,305,906,000	3,305,663,282	(242,718)	99.99	2,303,217,000	2,301,426,287	(1,790,713)	99.92
2. Belanja Barang	4,819,671,000	3,060,440,230	(1,759,230,770)	63.50	3,506,775,000	3,303,110,300	(203,664,700)	94.19
3. Belanja Modal	9,212,000,000	6,686,739,850	(2,525,260,150)	72.59	0	0	0	0
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Belanja Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Transfer ke Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 022
ESELON I : DITJEN PERHUBUNGAN UDARA 05
SATUAN KERJA : KANTOR UPBU KIMAM 499578

Tgl Data : 13/02/26 7:44 AM
Tgl Cetak : 13/02/26 1:09 PM
Halaman : 2
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2025				2024			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
1. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Insentif Fiskal	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	17,337,577,000	13,052,843,362	(4,284,733,638)	75.29	5,809,992,000	5,604,536,587	(205,455,413)	96.46
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :
FINAL

KIMAAM, 13 Februari 2026
Penanggung Jawab UAKPA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

AGUS KURNIAWAN, S.SiT, M.M.
NIP. 197202211996021001

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
UNIT ORGANISASI : (05) DITJEN PERHUBUNGAN UDARA
WILAYAH/PROVINSI : (2500) PAPUA
SATUAN KERJA : (499578) KANTOR UPBU KIMAM

Tgl Data : 13/02/26 7:44 AM

Tgl Cetak : 13/02/26 1:09 PM

Halaman : 1

lap_neraca_satker_komparatif_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2025	2024	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Persediaan	1,393,605	4,507,155	(3,113,550)	(69.08)
JUMLAH ASET LANCAR	1,393,605	4,507,155	(3,113,550)	(69.08)
ASET TETAP				
Peralatan dan Mesin	17,414,868,300	7,277,144,300	10,137,724,000	139.31
Gedung dan Bangunan	13,657,490,000	13,560,490,000	97,000,000	0.72
Jalan, Irigasi dan Jaringan	23,917,446,500	23,917,446,500	0	0.00
Aset Tetap Lainnya	4,290,005,000	4,290,005,000	0	0.00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	1,970,140,770	0	1,970,140,770	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN	(28,871,016,358)	(17,580,235,244)	(11,290,781,114)	64.22
JUMLAH ASET TETAP	32,378,934,212	31,464,850,556	914,083,656	2.91
ASET LAINNYA				
Aset Tak Berwujud	2,396,639,850	0	2,396,639,850	0.00
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	633,110,630	0	633,110,630	0.00
JUMLAH ASET LAINNYA	3,029,750,480	0	3,029,750,480	
JUMLAH ASET	35,410,078,297	31,469,357,711	3,940,720,586	12.52
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	300,651,400	0	300,651,400	0.00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	300,651,400	0	300,651,400	
JUMLAH KEWAJIBAN	300,651,400	0	300,651,400	
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	35,109,426,897	31,469,357,711	3,640,069,186	11.57
JUMLAH EKUITAS	35,109,426,897	31,469,357,711	3,640,069,186	11.57
JUMLAH EKUITAS	35,109,426,897	31,469,357,711	3,640,069,186	11.57
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	35,410,078,297	31,469,357,711	3,940,720,586	12.52

Keterangan :

FINAL

KIMAAM, 13 Februari 2026

Penanggung Jawab UAKPA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

AGUS KURNIAWAN, S.Si, M.M.

NIP. 197202211996021001 197202211996021001